

PENERAPAN *E-GOVERNMENT* PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Muhammad Muchti Nuh

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The purpose of this study is to know how e-government, through SIMPEG, is implemented at Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru. This study focused on the effectiveness of implementing SIMPEG and some obstacles appeared in implementing SIMPEG at BKD Pekanbaru. This research was formulated as How was the implementation of e-government at BKD Kota Pekanbaru. This research was a qualitative research which used observation and interview in order to get the data. The results showed that the implementation of SIMPEG at BKD Kota Pekanbaru was effective enough. The effectiveness was analyzed based on three criteria: production, efficiency and sustainable. From the production criterion, SIMPEG needs more improvement to make it more effective. From the efficiency criterion, it was found that BKD Pekanbaru needs to add the number of staffs who operated SIMPEG. Then, from the sustainable criterion, the implementation was good enough. However, further training and control are required to improve the quality of SIMPEG. In addition, this research also found that the obstacles occurred during the implementation were the lack of internet connection, human resources, supporting tools, trainings. It was also found some staff who were less aware about the importance of SIMPEG.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *e-government* melalui SIMPEG dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru. Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan SIMPEG dan beberapa kendala muncul dalam menerapkan SIMPEG di BKD Pekanbaru. Penelitian ini dirumuskan sebagai bagaimana implementasi *e-government* di BKD Kota Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMPEG di BKD Kota Pekanbaru cukup efektif. Efektivitas dianalisis berdasarkan tiga kriteria: produksi, efisiensi dan berkelanjutan. Dari kriteria produksi, SIMPEG membutuhkan lebih banyak perbaikan agar lebih efektif. Dari kriteria efisiensi, ditemukan bahwa BKD Pekanbaru perlu menambah jumlah staf yang mengoperasikan SIMPEG. Kemudian dari kriteria yang berkelanjutan, implementasinya cukup baik. Namun pelatihan dan kontrol lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kualitas SIMPEG. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kendala yang terjadi selama implementasi adalah kurangnya koneksi internet, sumber daya manusia, alat pendukung, dan pelatihan. Selain itu juga menemukan beberapa staf yang kurang sadar tentang pentingnya SIMPEG.

Kata Kunci: SIMPEG, *e-government*, efisiensi

PENDAHULUAN

E-government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Selaras dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*E-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,

bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *E-government*.

E-government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 mengamanatkan setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun Rencana Strategis Pengembangan *E-government* di lingkungannya masing-masing. Rencana Strategis itu dengan jelas menjabarkan lingkup dan sasaran pengembangan *E-government* yang ingin dicapai. Sejalan dengan pengembangan *E-*

government dan perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin canggih di era globalisasi ini, teknologi informasi dengan menggunakan komputer, telah menyederhanakan tugas menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar, dan dapat menjadi bantuan yang tak ternilai dalam manajemen sumber daya manusia. Pada akhirnya dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.

SIMPEG merupakan suatu aplikasi perangkat lunak (*software*) yang dipergunakan untuk mengelola data-data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dan menyeluruh. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda menyebutkan bahwa: "Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah suatu totalitas yang terpadu yang terdiri atas perangkat pengolahan meliputi pengumpulan, prosedur, tenaga pengolah, dan perangkat lunak; perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, bergantung, dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian."

Di tengah upaya penyempurnaan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian di BKD Kota Pekanbaru, terdapat beberapa persoalan yang secara keseluruhan cukup menonjol. Antara lain belum adanya Peraturan daerah atau Peraturan Walikota mengenai SIMPEG, kurangnya kesadaran pegawai terhadap data kepegawaian serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan SIMPEG yang mana di bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai hanya terdapat 2 (dua) unit komputer dan memiliki 3 (tiga) pegawai yang mengolah SIMPEG. Hal ini berkaitan dalam pelaksanaan SIMPEG untuk mewujudkan *E-government* yang berakibat pada kurang efektif dan efisiennya pemuktahiran data pegawai, pengumpulan data yang kurang cepat, lemahnya proses *data entry* yang sangat menentukan proses pengolahan data selanjutnya.

Kondisi yang diinginkan (*output*) dari SIMPEG adalah dapat memberikan pelayanan administrasi kepegawaian secara tepat dan cepat dalam mengolah ataupun menyediakan informasi

kepegawaian baik berupa data-data pegawai maupun pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian, sehingga apabila sewaktu-waktu membutuhkan informasi yang berkaitan dengan penempatan pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya dapat diproses secara cepat, tepat dan akurat dalam penyajiannya.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas implementasi *E-government* melalui SIMPEG pada BKD Kota Pekanbaru dan apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam implementasi *E-government* melalui SIMPEG yang ada pada BKD Kota Pekanbaru. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektifitas implementasi *E-government* melalui SIMPEG pada BKD Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam implementasi *E-government* melalui SIMPEG pada BKD Kota Pekanbaru.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti kondisi implementasi *E-government* yang diterapkan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru untuk memahami sejauh mana efektifitas pelaksanaan *E-government* di lingkungan BKD Kota Pekanbaru itu sendiri. Disamping itu, peneliti juga melihat apa saja kendala atau hambatan yang terjadi selama implementasi *E-government* di BKD Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh staf dan pegawai yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru dan pegawai dari instansi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektif atau tidaknya implementasi *e-government* khususnya SIMPEG pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru dapat dilihat dari beberapa indikator. Kriteria pertama untuk melihat efektif atau tidaknya pelaksanaan suatu sistem, yaitu produksi. Hal ini mengacu pada ukuran keluaran utama pelaksanaan sistem yang berhubungan langsung dengan

yang digunakan oleh pelanggan dan rekanan sistem. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan produksi adalah ukuran gambaran hasil implementasi SIMPEG di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru. Apakah SIMPEG sudah bisa diakses dengan baik oleh seluruh pegawai dan staf, kemampuan SIMPEG dalam memerankan fungsinya serta ketersediaan jaringan untuk mengakses SIMPEG itu sendiri.

Penerapan SIMPEG di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru didasari oleh Permendagri no. 157 tahun 2000. Dengan kata lain, pelaksanaan SIMPEG di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru telah memiliki dasar dan prosedur yang jelas. Namun, akan menjadi lebih baik apabila pelaksanaan SIMPEG ini dipayungi oleh Perwako Pekanbaru meskipun untuk Tim Pengelola SIMPEG sendiri sudah ada Perwakonya. Kemudian, prosedur dalam pelaksanaan SIMPEG di BKD Pekanbaru terkait dengan pengumpulan data pegawai dari SKPD hingga keluarnya SK dan informasi sebagai output sesuai dengan standar baku prosedur pelaksanaan kerja. Sejak pertama kali pembangunan SIMPEG di BKD Pekanbaru telah terjalin kerjasama dan kesepakatan antara SKPD dengan BKD dalam memberikan informasi kepegawaian.

Di dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan SIMPEG yang dijalankan oleh BKD Pekanbaru, subsistem input merupakan proses awal dari sebuah perjalanan arus informasi. Dalam sub sistem input ini dikumpulkan data masukan dari SKPD-SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru maupun bidang-bidang kerja yang berada di internal BKD. BKD sebagai instansi pelaksana dari SIMPEG berkewajiban untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data kepegawaian dari masing-masing SKPD. Sedangkan untuk mengetahui bahwa suatu sistem itu merupakan sistem informasi yang baik, dapat dilihat dari informasi yang masuk ke dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM). Informasi yang dihasilkan itu harus merupakan informasi yang tepat, dalam hal ini informasi itu harus memenuhi kualitas informasi.

Tahap berikutnya dalam perjalanan arus

informasi yaitu mekanisme pengolahan data untuk kemudian di simpan ke dalam suatu database. Di dalam pengolahan data di dalam database ini akan sangat mengacu pada sistem software dan hardware yang efektif sehingga memperoleh output sesuai dengan kebutuhan. Setelah data-data input diproses, kemudian informasi dihasilkan dan diberikan kepada perangkat output. Output merupakan suatu hasil dari proses perjalanan informasi untuk kemudian digunakan dalam rangka memberikan informasi yang berguna bagi pelaksanaan fungsi BKD dalam menjalankan manajemen dan pelayanan kepegawaian. Output dari SIMPEG ini nantinya juga digunakan sebagai sumber informasi guna pengambilan keputusan di bidang kepegawaian. Dimana wujud dari pelaksanaan SIMPEG di BKD ini adalah Surat-surat Keputusan, Informasi Kepegawaian, rekapitulasi PNS, Bizzeting, Daftar Urut Kepegawaian, Analisa Baperjakat dan banyak lagi informasi yang dihasilkan untuk digunakan sebagai sumber informasi baik bagi pelaksanaan tugas intern BKD Pekanbaru sendiri maupun untuk *stakeholders*.

Untuk mengetahui bahwa informasi yang dihasilkan tersebut merupakan informasi yang memenuhi kualitas informasi maka karakteristik untuk mengidentifikasi sistem informasi yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa elemen. Pertama, output data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *hard-copy* dan *soft-copy*. Media yang digunakan untuk output data dalam bentuk *hardcopy* adalah printer dan disimpan juga di dalam program SIMPEG sebagai *soft-copy* yang dapat diakses kembali bilamana diperlukan. Untuk bentuk *hard-copy*, output yang biasanya dihasilkan adalah Surat-surat Keputusan, rekapitulasi data PNSD, Bizzeting, ataupun Daftar Urut Kepegawaian (DUK). Selama ini output yang dikeluarkan BKD ada yang terdapat standard bakunya, ada pula yang tidak. Output yang sudah ada standar bakunya yakni pada penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) karena nantinya akan digunakan untuk Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Sedangkan format laporan yang lain sesuai dengan kebutuhan atau permintaan pengguna. Output SIMPEG yang berupa informasi

kepegawaian sudah dimanfaatkan secara optimal, bahkan dapat dikatakan sebagai ujung tombak manajemen kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Pekanbaru. Informasi yang dihasilkan oleh SIMPEG juga digunakan oleh Kepala Badan dan Kepala Bidang untuk melakukan tugas manajerial kepegawaian. Untuk Kepala Badan, SIMPEG digunakan dalam perencanaan program Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah dan untuk membuat kebijakan di Bidang Kepegawaian, seperti penandatanganan Surat Keputusan Kepala Badan dan SK Mutasi Pegawai. Informasi dari SIMPEG juga digunakan untuk kepentingan *stakeholders* yang lain, seperti Badan Pusat Statistik, untuk memperoleh data dan informasi Bidang Kepegawaian di Kota Pekanbaru. Mahasiswa juga mengambil data yang dihasilkan dari SIMPEG untuk keperluan penelitian. *Stakeholders* lainnya adalah bank-bank negara yang menggunakan rekap data kepegawaian untuk keperluannya.

Kriteria kedua yang menjadi tolak ukur efektivitas penerapan SIMPEG pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru yaitu efisiensi. Kriteria ini mengacu pada ukuran penggunaan sumberdaya yang langka dalam mengoptimalkan penerapan SIMPEG. Efisiensi pelaksanaan SIMPEG dari jumlah pegawai atau staf yang menjalankan SIMPEG, tingkat keberhasilan penerapan SIMPEG, dan biaya yang dialokasikan untuk menerapkan SIMPEG. Untuk melihat efektivitas pelaksanaan suatu sistem, jumlah pegawai memiliki peran yang penting. Cakupan pelayanan yang luas dan banyak menyebabkan BKD harus mampu menghimpun informasi kepegawaian dari masing-masing SKPD agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat, baik yang bersifat rutin maupun strategis. Maka dari itu, peran Sumber Daya Manusia (Pegawai) dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen merupakan unsur yang sangat sentral. Karena secanggih apapun teknologi yang diterapkan dalam sebuah instansi jika tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia untuk menjalankan, mengelola, dan mengembangkannya, maka dapat dipastikan tidak akan membawa hasil yang maksimal.

Kesiapan SDM yang akan melaksanakan

sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) ini dapat menggambarkan kesuksesan pelaksanaan sistem selanjutnya. Di BKD Pekanbaru sendiri jumlah pegawai yang menangani SIMPEG hanya berjumlah 3 orang yang terdiri dari seluruh pegawai di Bidang Pengadaan Pegawai dan Sistem Informasi dan pelaksana di tiap-tiap bidang yang bertugas untuk memperbarui (*update*) data SIMPEG sesuai dengan tugas yang dijalankan. Jumlah ini dirasa belum mencukupi dalam pelaksanaan SIMPEG, hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya masalah yang timbul dalam pelaksanaan sistem yang baru.

Kecukupan jumlah pegawai pelaksana SIMPEG di BKD Pekanbaru itu bersifat kontekstual karena memang pelaksanaan dan tugas-tugas yang dijalankan berbeda di masing-masing Bidang. Di Bidang Pengadaan Pegawai dan Sistem Informasi sebagai pusat pengelolaan SIMPEG, jumlah pegawai yang menangani masih sedikit, yakni 3 orang. Jumlah tersebut dirasa belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan SIMPEG. Selain itu, juga terlihat adanya perangkapan jabatan oleh pegawai di beberapa Bidang. Hal ini menyebabkan *update* data intern BKD sendiri menjadi terhambat karena lebih mementingkan pelaksanaan tugas yang harus segera dilaporkan. Tidak meratanya pembagian tugas dan terjadinya konsentrasi pekerjaan yang lebih banyak pada pegawai tertentu, diatasi dengan tidak tertutupnya kemungkinan pegawai yang satu membantu pekerjaan pegawai yang lainnya dengan ketentuan masih berada dalam satu bidang tugas, hal ini dimaksudkan agar pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan mengatasi ketimpangan beban tugas. Pegawai BKD Pekanbaru belum mampu menjalankan SIMPEG secara efektif, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan kebiasaan. Sedangkan dalam hal pemrograman masih harus melibatkan pihak ketiga. Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa fleksibilitas dalam organisasi masih kurang dalam hal penyusunan program pengolahan data dan penentuan struktur atau format data secara mandiri.

Kriteria terakhir yang digunakan untuk mengetahui efektivitas penerapan SIMPEG pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru yaitu kelangsungan hidup atau *sustain-*

nable. Kriteria ini mengacu kepada tanggung jawab organisasi/ instansi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

Selama dilaksanakannya SIMPEG oleh BKD Pekanbaru, pelatihan yang telah diberikan adalah pada saat pengembangan program SIMPEG pada tahun 2007, dimana pegawai dari BKD ikut dilibatkan dalam pembuatan program SIMPEG dan diberikan pertukaran informasi. Meskipun belum terdapat pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, namun telah dilakukan sosialisai berupa pembelajaran oleh pihak rekanan selama 3 bulan selama pengembangan program SIMPEG dan sharing informasi dari pihak rekanan. Pembagian informasi sudah dilakukan setiap ada penambahan aplikasi baru atau saat ada pengembangan SIMPEG. Hal ini membantu pegawai dalam menerima program dengan bentuk aplikasi baru. Hanya saja pelatihan yang diberikan oleh rekanan ini hanya dilakukan pada pengguna rutin SIMPEG di masing-masing Bidang. Dimana pengguna SIMPEG di masing-masing bidang yang mengikuti pelatihan tersebut secara otomatis menjadi pengampu penggunaan SIMPEG di Bidangnya. Dengan kata lain, pelatihan yang dilakukan di BKD Pekanbaru adalah pada tingkat pesonel yang mengoperasikan (*operating personel*). Idealnya pendidikan mengenai sistem baru dilakukan juga ditingkat pemakai informasi (*users*), termasuk didalamnya semua unsur manajemen, yakni Kepala Bidang khususnya pada Bidang Perencanaan dan Informasi Pegawai yang bertanggung jawab pada pelaksanaan SIMPEG.

Hakikat dari suatu penyelenggaraan pelatihan tidak hanya dalam hal pelaksanaan tugas rutin pada staf pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan pengoperasian. Karena masalah yang sebenarnya dihadapi sebuah sistem bukan hanya pada pelaksanaan saat itu, tetapi juga pada pengembangan selanjutnya. Kemudian jumlah staf yang mengikuti pelatihan saat pengembangan sistem juga hanya melingkupi pelaksana rutin dan belum dapat digantikan oleh pegawai lain. Masih banyak staf terlebih pimpinan yang belum sepenuhnya memiliki pengetahuan tentang program SIMPEG yang sebenarnya masih dapat ditingkatkan kemampuannya

melalui program pendidikan dan pelatihan.

Prosedur kontrol adalah prosedur yang menspesifikasi bagaimana proses dapat dikontrol. Dalam sistem komputer sejumlah kontrol harus diletakkan di tempat yang mendapatkan keamanan, ketepatan dan privasi data sehingga kegiatan sistem akan menghasilkan produk informasi yang layak dan akuntabel bagi pemakai informasi. Prosedur kontrol ini meliputi kontrol keamanan, kontrol ketepatan, dan kontrol privasi. Ketiga prosedur kontrol ini sudah dilakukan oleh BKD dalam menjalankan SIMPEG. Sebelum data masukan dimasukkan ke dalam sistem informasi, dilakukan prosedur kontrol untuk memutakhirkan data. Hal ini dilakukan untuk menjamin data yang masuk ke dalam sistem tidak terjadi kesalahan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru. Hambatan-hambatan tersebut terkait dengan pelaksanaan SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru: a) Belum terbangun jaringan yang baik, jaringan merupakan salah satu komponen penting yang dapat memberikan perubahan dalam pengaksesan informasi dan data-data pegawai. Dengan adanya jaringan, maka proses penyampaian informasi dan data pegawai dapat tercapai dengan cepat. Dalam implementasi pelaksanaan SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru, terdapat kendala pada jaringan internet yang dipakai. Jaringan internet yang digunakan subbagian data untuk mengakses SIMPEG sering terputus. Hal ini dirasakan langsung peneliti ketika diperlihatkan tentang aplikasi SIMPEG oleh salah satu pegawai di Subbagian Data dan Informasi. Pada saat itu, peneliti menemukan bahwa koneksi internet terputus sehingga Subbagian Data tidak dapat mengakses SIMPEG. b) Kurangnya jumlah tenaga pengelola SIMPEG, sumber Daya Manusia merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu sistem, karena segala sesuatu faktor dan komponen dikendalikan oleh sumber daya manusia. Pegawai pada Kasubbid Data dan Informasi merupakan sumber daya manusia yang mengelola dan mengolah data pegawai melalui

SIMPEG secara langsung. Pegawai yang mengelola SIMPEG secara langsung ini hanya berjumlah tiga orang. Pengelola data pegawai yang jumlahnya sangat banyak tidak bisa dikelola hanya oleh tiga orang pegawai saja karena tugas pengelolaan data itu dimulai dari pengumpulan, pemasukan, pengelolaan, sampai dengan penyajian data kepada *user*. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas yang cukup berat maka dibutuhkan penambahan jumlah pegawai pengelola SIMPEG agar pengelolaan SIMPEG berjalan dengan baik. c) Lemahnya perangkat pendukung, Salah satu hambatan dalam pelaksanaan SIMPEG adalah masih sering terjadi permasalahan pada perangkat pendukung dalam pengelolaan SIMPEG. Perangkat pendukung yang dimaksud adalah *hardware* serta ketersediaan *server*. Dalam implementasi SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru, unit komputer yang digunakan untuk mengelola SIMPEG belum mengikuti teknologi terkini. Hal ini menjadi hambatan dalam proses pengelolaan SIMPEG karena sering terjadi *error*. d) Kurangnya sosialisasi dan pelatihan, SIMPEG berbasis web merupakan program baru yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru. Karena program ini masih tergolong baru, diperlukan adanya sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh pegawai agar dapat menggunakan SIMPEG sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kenyataannya sosialisasi dan pelatihan mengenai SIMPEG masih sesekali dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru dan hal tersebut baru terbatas kepada Kasubag di masing-masing SKPD. Padahal penerapan SIMPEG ini wajib dipahami oleh seluruh pegawai.

SIMPULAN

Implementasi SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru secara keseluruhan sudah berjalan dan memberikan manfaat kepada *user* dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan pegawai, penempatan pegawai, pengembangan pegawai, manajemen kinerja, dan kesejahteraan pegawai. Namun

masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SIMPEG di BKD Kota Pekanbaru, kendala tersebut meliputi: 1) Belum terbangunnya jaringan yang baik dalam penggunaan SIMPEG yang menyebabkan tujuan SIMPEG dalam menciptakan keterbukaan dan kecepatan informasi menjadi terhambat. 2) Kurangnya jumlah tenaga pengelola SIMPEG sehingga menghambat pengelolaan data. 3) Masih lemahnya perangkat pendukung seperti server yang kapasitasnya masih kecil, belum adanya server *back up*, belum adanya ruangan khusus untuk server serta belum adanya UPS. 4) Kurangnya sosialisasi kepada seluruh pegawai.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur.
- Siwah Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bowman, Ann O'M. 2003. *Policy Implementation*, in *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy: First Update Supplement* (Jack Rabin, ed., pp.209-212). Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group.
- Bugin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Smith, Bruce L. 2003. *Public policy and public participation: Engaging Citizens and Community in the Development of Public Policy*. Canada: PPH-Atlantic.
- Sugiyono. 2000. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Prasetyo, Bambang & Jannah, Lina Miftahul. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- William, Dunn. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik, Teori, Analisis, dan Proses*. Jakarta: Bumi Aksara.